

**WACANA KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KASULTANAN
YOGYAKARTA DAN RELEVANSINYA DENGAN KESETARAAN
GENDER DALAM ISLAM PERSPEKTIF AMINA WADUD**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh :

Naufal Dwi Putra Agusti

NIM. 19105010005

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1414/Un.02/DU/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : WACANA KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KESULTANAN YOGYAKARTA DAN RELEVANSINYA DENGAN KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM PERSPEKTIF AMINA WADUD

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAUFAL DWI PUTRA AGUSTI
Nomor Induk Mahasiswa : 19105010005
Telah diujikan pada : Jumat, 04 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

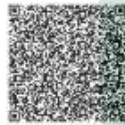
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Ali Usman, M.S.I
SIGNED

Valid ID: 64d318b793d0



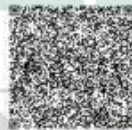
Penguji II
Dr. H. Fahrudin Faiz, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e49b7311f3



Penguji III
Novian Widiadharma, S.Fil., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64d319012d64



Yogyakarta, 04 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 64d59d8072e4

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Naufal Dwi Putra Agusti
NIM : 19105010005
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam
Alamat Rumah : Demakan TR.III/529, RT.32 RW.08, Tegalrejo, Yogyakarta
Alamat Domisili : Demakan TR.III/529, RT.32 RW.08, Tegalrejo, Yogyakarta
Telp/HP : 087872789100
Judul : Wacana Kepemimpinan Perempuan dalam Kasultanan Yogyakarta dan Relevansinya dengan Kesetaraan Gender dalam Islam Perspektif Amina Wadud


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bila mana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan, terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan maka saya dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya ini bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar sarjana saya.
4. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Juli 2023

Saya yang menyatakan,


Naufal Dwi Putra Agusti
NIM : 19105010005

NOTA DINAS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230
E-mail: fd@uin-suka.ac.id, Yogyakarta 55281

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Naufal Dwi Putra Agusti
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Naufal Dwi Putra Agusti
NIM : 19105010005
Judul Skripsi : Wacana Kepemimpinan Perempuan dalam Kasultanan Yogyakarta dan Relevansinya dengan Kesetaraan Gender dalam Islam Perspektif Amina Wadud

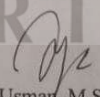
Sudah dapat diajukan kembali ke Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Program Studi Akidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Akidah dan Filsafat Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamuataikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Juli 2023
Pembimbing


Ali Usman, M.S.I

NIP. 198404202019031012

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”

QS. Al-Baqarah : 286

“Kau mencintai budi pekerti, kau laksana ibu mencintai anaknya; tetapi bilakah kau dengar ibu minta dibayar bagi cintanya?...”

Sabda Zarathustra, F.W. Nietzsche

“Adalah masuk akal bahwa seseorang hanya dapat memberikan kemampuannya yang terbaik hanya apabila ia berminat pada pekerjaannya,...”

ABC Anarkisme, Alexander Berkman



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Kedua orang tua penulis, Bapak Tihan Arantika dan Ibu Diani Agustiwati tercinta

Terima Kasih untuk dukungan dari pembentukan judul dan bantuan lainnya
Winanda Bintang Prasetyo dan Siti Lutfiyah selaku teman baik saya.

Terima kasih kepada teman-teman Perlangkidan, BIN, dan GSZ selaku pemberi
semangat dalam mengerjakan skripsi.

Almamater penulis Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hingga kepada teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan semua sudah
membantu memberikan dukungan dan masukan lainnya saya ucapkan terima
kasih.

Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah
mampu dan mau berjuang menyelesaikan skripsi ini hingga selesai

ABSTRAK

Wacana mengenai pengangkatan putri sulung sultan sebagai penerus tahta Kesultanan Yogyakarta menuai polemik. Terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat dan kerabat kraton. Sebab dalam sejarah kesultanan Yogyakarta belum pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap paugeran atau hukum fundamental kerajaan oleh kerabat kraton. Namun dalam perspektif gender Amina Wadud, perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin sebagaimana laki-laki. Islam berpandangan bahwa setiap manusia dapat menjadi pemimpin berdasarkan kemampuan dan kecakapan dalam memimpin, tanpa memandang jenis kelamin. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut; 1. Mengapa dalam sejarah Kesultanan Yogyakarta tidak mengangkat perempuan sebagai raja? 2. Bagaimana wacana kepemimpinan perempuan oleh Putri Mahkota Kesultanan Yogyakarta dilihat dari perspektif gender Amina Wadud? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola suksesi raja-raja Kasultanan Yogyakarta dan memahami perspektif gender Amina Wadud dalam memandang perempuan sebagai pemimpin di Kasultanan Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-interpretatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi pustaka. Sumber primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah karya-karya Amina Wadud yang diantaranya; *Qur'an and Women* (1992), dan *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam* (2006). Sedangkan data primer yang digunakan dalam menggali persoalan Kraton Ngayogyakarta adalah buku karya Susilo Harjono yang berjudul, *Kronik Suksesi Keraton Jawa 1755-1989*. Lalu, data sekunder yang digunakan adalah bersumber dari buku-buku, karya ilmiah, dan artikel berita yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menemukan bahwa Islam memperbolehkan perempuan untuk menjadi pemimpin, baik dalam ruang domestik, sosial, politik, budaya, atau bahkan agama. Sebagaimana yang digagas Amina Wadud bahwa tidak ada larangan dalam al-Qur'an mengenai perempuan sebagai pemimpin. Namun, penafsiran al-Qur'an tradisional yang bersifat patriarkis justru berupaya mengerdilkan peran kepemimpinan perempuan. Menurut Wadud, perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam menjadi pemimpin, selama ia memiliki kapasitas dan kapabilitas. Dalam hal ini GKR Mangkubumi memiliki hak untuk menjadi sultan di Kasultanan Yogyakarta. Sebab, GKR Mangkubumi dinilai memiliki pengalaman dan kemampuan dalam memimpin.

Kata Kunci: Pemimpin Perempuan, Kasultanan Yogyakarta, Gender, Amina Wadud

ABSTRACT

The discourse on the appointment of the sultan's eldest daughter as the successor to the throne of the Sultanate of Yogyakarta is polemic. There are pros and cons among the public and relatives of the palace. This is because in the history of the Sultanate of Yogyakarta, a woman has never ruled. This is considered a violation of *paugeran* or the fundamental law of the kingdom by the relatives of the palace. However, in Amina Wadud's gender perspective, women have the same opportunity to become leaders as men. Islam views that every human being can become a leader based on their ability and proficiency in leading, regardless of gender. Based on this problem, the researcher formulates the following problems; 1. Why in the history of the Sultanate of Yogyakarta did not appoint women as kings, 2. How is the discourse on women's leadership by the Crown Princess of the Sultanate of Yogyakarta seen from Amina Wadud's gender perspective? The purpose of this research is to find out the succession patterns of the kings of the Yogyakarta Sultanate and understand Amina Wadud's gender perspective in viewing women as leaders in the Yogyakarta Sultanate.

The type of research used in this study uses descriptive-interpretative research. The data collection methods used are documentation and literature study. The primary sources used in this research are Amina Wadud's works including; *Qur'an and Women* (1992), and *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam* (2006). While the primary data used in exploring the issue of the Ngayogyakarta Palace is a book by Susilo Harjono entitled, *Chronicle of the Succession of the Javanese Palace 1755-1989*. Then, the secondary data used is sourced from books, scientific papers, and news articles that are relevant and accountable.

The results obtained in this study found that Islam allows women to become leaders, whether in the domestic, social, political, cultural, or even religious spheres. As initiated by Amina Wadud, there is no prohibition in the Qur'an regarding women as leaders. However, the traditional patriarchal interpretation of the Qur'an seeks to downplay the leadership role of women. According to Wadud, women have the same rights and opportunities as men in becoming leaders, as long as they have the capacity and capability. In this case, GKR Mangkubumi has the right to become the sultan of Yogyakarta Sultanate. This is because she is considered to have the experience and ability to lead.

Keywords: Women Leader, Sultanate of Yogyakarta, Gender, Amina Wadud

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Pencipta seluruh alam semesta beserta isinya. Sebagaimana Tuhan pemberi rahmat dan karunia serta senantiasa selalu mencurahkan kasih sayang-Nya kepada setiap makhluk-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan memberikan umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Nabi adalah suri tauladan dan panutan kita semua dalam perkataan dan perbuatan untuk menjalankan perintah dari Allah SWT.

Atas segala limpahan rahmat-Nya dan dukungan dari berbagai pihak, maka segala bentuk kesulitan penulis dapat teratasi. Oleh karena itu, terselesaikannya skripsi ini adalah suatu berkah kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan dari berbagai pihak terutama bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis mengucapkan beribu-ribu terimakasih kepada :

1. Orang tua penulis, Bapak Tihan Arantika dan Ibu Diani Agustiwati yang selalu mendo'akan demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi dan terimakasih atas kecukupan kebutuhan selama menempuh ke perguruan tinggi.
2. Prof. Dr. Phil. Al Makhin., S.Ag., MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan dalam proses penyelesaian tugas akhir.

5. Para dosen Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, yang telah memberikan segenap ilmunya selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam.

6. Winanda Bintang Prasetyo, Siti Lutfiyah, Ardan Putra Hutasuhut, Muhammad Hafizh, Intan Kurnia Salim, dan Affansyah Prawirayudha selaku teman baik penulis yang sudah membantu dari masa kesulitan di awal dan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang selalu saya tanyakan kepada mereka tanpa henti.

7. Teman-teman Perlangkidan, BIN, dan GSZ yang telah membantu dan menjadisaksi saya dalam proses penelitian ini.

8. Teman-teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan telah menemani penulis dalam segala keadaan.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan, arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi. Penulis hanya dapat berdo'a semoga kebaikan yang diberikan di balas oleh Allah SWT dan semoga kita selalu dilimpahkan kebaikan olehNya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, penulis mengharapkan kritik dan saran yang baik demi kesempurnaan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Juli 2023

Penulis

Naufal Dwi Putra Agusti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Landasan Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II: KEPEMIMPINAN PEREMPUAN, PERJUANGAN HAK BERPOLITIK, DAN KONSEP GENDER PERSPEKTIF AMINA WADUD.....	16
A. Definisi Feminisme, Gender, dan Jenis Kelamin.....	16
B. Sejarah Perjuangan Hak Berpolitik Perempuan.....	18
1.) Gerakan Feminisme Awal.....	20
2.) Gerakan Feminisme Gelombang Pertama.....	21
3.) Gerakan Feminisme Gelombang Kedua.....	22
4.) Gerakan Feminisme Gelombang Ketiga.....	23
C. Hak Politik Perempuan dalam Konstitusi Indonesia.....	24
D. Perempuan sebagai Pemimpin menurut Islam dalam Pemikiran Gender Amina Wadud.....	27

BAB III: DINAMIKA SUKSESI RAJA-RAJA KASULTANAN YOGYAKARTA DAN WACANA RAJA PEREMPUAN	36
A. Dinamika dan Konflik dalam Suksesi Raja-raja Kasultanan Yogyakarta	36
1. Berdirinya Kasultanan Yogyakarta dan Naik Tahta Sultan Pertama	36
2. Gejolak Suksesi Sultan HB II ke HB III	38
3. Suksesi Sultan HB V ke HB VI Tanpa Putera Mahkota	40
4. Konflik Putera Mahkota pada Suksesi Sultan HB VII ke VIII	41
B. Integrasi Kraton Yogyakarta dengan NKRI dan Undang-undang Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta	43
C. Sabda Raja dan Dinamika Suksesi Masa Kini	45
D. Kepemimpinan Perempuan dalam Sejarah Kerajaan di Indonesia.....	48
1. Ratu Shima	49
2. Tribhuwana Tungadewi.....	49
3. Ratu Nur Ilah.....	50
4. Sultan Nahrasiyah	52
5. Nyi Ageng Serang.....	52
BAB IV: ANALISIS KASUS PENGANGKATAN GKR MANGKUBUMI DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER AMINA WADUD.....	54
A. Polemik Kebudayaan.....	54
B. Polemik Agama	60
BAB V: PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wacana mengenai pengangkatan putri sulung sultan sebagai penerus tahta Kesultanan Yogyakarta menuai polemik. Terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat dan kerabat kraton. Sebab dalam sejarah kesultanan Yogyakarta belum pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap paugeran atau hukum fundamental kerajaan oleh kerabat kraton.¹ Namun dalam perspektif gender Amina Wadud, perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin sebagaimana laki-laki. Islam berpandangan bahwa setiap manusia dapat menjadi pemimpin berdasarkan kemampuan dan kecakapan dalam memimpin, tanpa memandang jenis kelamin.²

Meskipun lazimnya sebuah kerajaan dipimpin oleh seorang laki-laki, namun dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara tercatat perempuan menjadi pemimpin atau raja. Beberapa diantaranya, Sultanah Nahrasiyah yang merupakan seorang Sultan di kerajaan Samudra Pasai. Beliau diangkat menjadi raja sebagai penerus ayahnya, Raja Malikussaleh. Kemudian di tanah Jawa ada Ratu Ayu Kencanawungu, yang merupakan

¹ Wahyuni Susilowati, "GKR Mangkubumi Akan Jadi Ratu Pertama Kraton Yogyakarta", *kompasiana* (2019), <https://www.kompasiana.com/sacred-edelweiss/5db96189d541df77141794c2/gkr-mangkubumi-akan-jadi-ratu-pertama-kraton-yogya>.

² Putri Jannatur Rahmah and YUSDANI YUSDANI, "Konsep Gender Equality Perspektif Islam: Studi Kasus Pengangkatan Putri Mahkota Sri Sultan Hamengkubuwana X Di Yogyakarta", *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, vol. 2, no. 1 (2020), pp. 362–80.

seorang ratu kerajaan Majapahit. Ratu Ayu Kencanawungu ialah sosok raja perempuan terakhir yang menguasai kerajaan Majapahit.³

Kasultanan Yogyakarta adalah satu dari kerajaan Islam yang masih eksis di Indonesia. Sebagai sebuah kerajaan, Kasultanan Yogyakarta dipimpin oleh seorang raja atau sultan yang memiliki periode kekuasaan yang tak terbatas. Namun, kekuasaan seorang raja memerlukan suksesi atau penerus untuk melanjutkan tampuk kekuasaan sepeninggalannya nanti. Sistem suksesi kepemimpinan ditentukan oleh hubungan darah atau sistem kekerabatan. Seorang raja memiliki hak penuh dalam memilih calon penerus tahtanya. Biasanya seorang raja akan memilih anak laki-laknya yang paling berkompeten dan dirasa mampu untuk meneruskan kekuasaan sang ayah.⁴

Dalam sejarah, suksesi Kasultanan Yogyakarta telah menghadapi beberapa persoalan. Mulai dari kudeta hingga raja yang tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerus tahtanya. Untuk persoalan kedua ini pernah terjadi di masa Sultan Hamengkubuwono V yang hingga wafatnya beliau belum memiliki keturunan. Dengan begitu menurut *paugeran* yang berlaku, maka adik laki-laki Sultan Hamengkubuwono V, Raden Mas Sutojo, yang menjadi penerusnya. Karena dalam *paugeran* atau peraturan adat yang berlaku, mengharuskan seorang raja menurunkan tahtanya kepada anak

³ Ilmiawati Safitri, "Keraton Yogyakarta Masa Lampau dan Masa Kini: Dinamika Suksesi Raja-Raja Jawa dan Politik Wacana 'Raja Perempuan'", *Indonesian Historical Studies*, vol. 3, no. 1 (Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP), 2019), p. 44, https://www.researchgate.net/publication/334324416_Keraton_Yogyakarta_Masa_Lampau_dan_Masa_Kini_Dinamika_Suksesi_Raja-Raja_Jawa_dan_Politik_Wacana_Raja_Perempuan, accessed 20 Feb 2023.

⁴ Safitri, Ilmiawati, 'Keraton Yogyakarta Masa Lampau Dan Masa Kini: Dinamika Suksesi Raja-Raja Jawa Dan Politik Wacana "Raja Perempuan"', *Indonesian Historical Studies*, 3.1 (2019)

laki-lakinya. Namun jika seorang raja tidak memiliki anak laki-laki, maka raja perlu meneruskannya kepada kerabat laki-lakinya.⁵

Pada tahun 2015, Sultan Hamengkubuwana X mengeluarkan *Dhawuh Raja* yang berisi penobatan putri sulung beliau, GKR Pembayun, sebagai putri mahkota raja. Penobatan beliau sebagai calon penerus tahta akan membuat sejarah baru bagi Kasultanan Yogyakarta. Sebab pengangkatan GKR Pembayun, dengan perubahan gelar GKR Mangkubumi, ini akan menjadikan beliau sebagai raja atau sultan perempuan pertama dalam sejarah Kasultanan Yogyakarta. Hal ini terjadi karena Sultan Hamengkubuwono X tidak memiliki anak laki-laki. Sehingga beliau kemudian mengangkat anak perempuan pertamanya tersebut dengan harus merubah *paugeran* yang berlaku.⁶

Pengangkatan GKR Mangkubumi tersebut menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat maupun keluarga atau kerabat kraton. Sebagai salah satu kerajaan berbasis ajaran agama Islam, *paugeran* atau hukum adat menghendaki seorang sultan atau raja harus dari kalangan laki-laki. Sebagaimana yang disimbolkan dalam keris Ki Ageng Kopek dan keris Joko Piturun sebagai pusaka bawaan atau *ageman* raja-raja Kraton Yogyakarta selama ini. Sebab keris adalah simbol pusaka yang hanya diperuntukan untuk laki-laki.⁷

⁵ S Safitri, Ilmiawati, 'Keraton Yogyakarta Masa Lampau Dan Masa Kini: Dinamika Suksesi Raja-Raja Jawa Dan Politik Wacana "Raja Perempuan"', *Indonesian Historical Studies*, 3.1 (2019)

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Dalam al-Qur'an, seorang laki-laki ialah pemimpin bagi keluarga dan lingkungannya. Sebagaimana firman Allah pada Surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ
حُفَظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah **pemimpin** bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Di dalam ayat di atas dijelaskan bahwa laki-laki memiliki kelebihan dibanding perempuan dalam urusan kepemimpinan. Kata *Qawwamun* dalam ayat tersebut menjadi dalil dan legitimasi superioritas kepemimpinan laki-laki atas perempuan.⁸ Namun ayat tersebut dapat diinterpretasikan dengan makna yang berbeda menurut Amina Wadud.

Amina Wadud menggunakan hermeneutika Fazlur Rahman, berpendapat bahwa ayat tersebut tidak semata-mata meninggikan laki-laki di atas perempuan dalam persoalan tanggung jawab memimpin. Namun,

⁸ H. (Heri) Junaidi and A. (Abdul) Hadi, “Gender Dan Feminisme Dalam Islam”, *Muwazah*, vol. 2, no. 2 (Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2010), p. 153164, <https://www.neliti.com/publications/153164/>, accessed 20 Feb 2023.

hal tersebut dapat terjadi apabila telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an.⁹ Kriteria-kriteria tersebut dalam konteks pemimpin keluarga diantaranya adalah dapat memberi nafkah dan memiliki kelebihan kognitif dalam mengatur rumah tangga. Jika kriteria-kriteria tersebut dimiliki seorang perempuan, maka perempuan bertanggung jawab (*qawwamun*) atas laki-laki.¹⁰

Dalam memahami peran perempuan mengenai persoalan kepemimpinan tersebut, beberapa filsuf menyebut bahwa laki-laki *qawwamun* (bertanggung jawab) atas perempuan tidak dapat dimaknai sebagai keunggulan secara gender yang dimiliki oleh laki-laki dibanding perempuan. Namun, hal tersebut hanya berlaku secara fungsional apabila telah memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin. Sebagaimana kriteria pemimpin yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian mengenai wacana perempuan sebagai pemimpin di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui perspektif gender Amina Wadud.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika pengangkatan GKR Mangkubumi sebagai Putri Mahkota?
2. Bagaimana wacana kepemimpinan perempuan oleh Putri Mahkota Kesultanan Yogyakarta dilihat dari perspektif gender Aminan Wadud?

⁹ Yuni Harlina, "Hak Politik Perempuan dalam Islam", *Marwah*, vol. XIV, no. 1 (2015), pp. 1–18.

¹⁰ Jannatur Rahmah and Yusdani, "Konsep Gender Equality Perspektif Islam : Studi Kasus Pengangkatan Putri Mahkota Sri Sultan Hamengkubuwana X Di Yogyakarta".

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Memaparkan dinamika suksesi raja-raja kesultanan Yogyakarta.
2. Memahami perspektif gender Amina Wadud memandang perempuan sebagai pemimpin.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperkaya khazanah keilmuan mengenai perempuan sebagai pemimpin dalam perspektif filsafat Islam yang digambarkan dalam kasus pengangkatan putri mahkota kesultanan Yogyakarta sebagai penerus tahta.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam merumuskan konsep perempuan sebagai pemimpin dalam perspektif filsafat gender Amina Wadud, terutama dalam kasus suksesi kesultanan Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman baru melalui sudut pandang filsafat Islam mengenai persoalan suksesi GKR Mangkubumi sebagai penerus tahta Kesultanan Yogyakarta.
- b. Menjadi sumber rujukan dalam mengembangkan penelitian dalam filsafat Islam terutama berbasis filsafat gender Islam.

D. Kajian Pustaka

Literatur Review atau Kajian Pustaka merupakan uraian-uraian mengenai temuan dalam penelitian dan juga bahan-bahan yang menjadi acuan untuk dijadikan sebagai landasan peneliti dalam meneliti. Penelitian yang penulis ambil mengenai “Polemik Perempuan sebagai Khalifah di Yogyakarta melalui Perspektif Kesetaraan Gender Islam” memiliki

beberapa kemiripan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun penulis menggunakan perspektif dan analisis yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selain itu ada hal-hal yang belum dibahas dalam beberapa penelitian sebelumnya. Secara khusus, dalam kasus yang penulis bahas masih jarang untuk dikaji dalam perspektif kesetaraan gender. Beberapa penelitian yang terkait diantaranya;

Pertama, jurnal yang berjudul “Konsep Equality Gender Perspektif Islam : Studi Kasus Pengangkatan Putri Mahkota Sri Sultan Hamengkubuwana X di Yogyakarta” yang ditulis oleh Putri Jannatur Rahmah dan Yusdani. Dalam penelitian tersebut, peneliti mengkaji mengenai kepemimpinan perempuan melalui perspektif *Equality Gender* secara umum terhadap kasus pengangkatan GKR Mangkubumi sebagai putri mahkota. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa Islam tidak mempersoalkan perempuan sebagai pemimpin. Namun, justru budaya patriarkis dalam tradisi kepemimpinan yang selama ini berkembang di masyarakatlah yang membentuk persepsi tabu jika mereka dipimpin oleh perempuan. Selain itu, peneliti juga melihat pengangkatan tersebut menimbulkan banyak pro kontra di dalam masyarakat.¹¹

Kedua, Yuni Harlina dalam jurnalnya yang berjudul “Hak Politik Perempuan Dalam Islam” membahas mengenai peranan perempuan dalam bidang politik. Peneliti menggunakan sudut pandang hukum Syariah yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadist dalam memahami hak-hak politik perempuan. Terdapat dua perbedaan pendapat dikalangan mufassir dalam memahami konteks dalil kepemimpinan. Pertama dari pandangan pemahaman tekstual yang memahami bahwa laki-laki adalah mutlak pemimpin bagi perempuan. Dan yang kedua adalah tafsir kontekstual yang memahami perlunya memaknai dalil dalam konteks tertentu. Dalam jurnal

¹¹ *Ibid.*

tersebut dapat dipahami bahwa perempuan memiliki hak dalam berpolitik, namun dalam batas-batas kodrati sebagai perempuan.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh mahasiswi pascasarjana UGM, Ilmiawati Safitri, yang berjudul “Kraton Yogyakarta Masa Lampau dan Masa Kini: Dinamika Suksesi Raja-raja Jawa dan Politik Wacana Raja Perempuan di Kartan Yogyakarta”. Peneliti dalam jurnal ini menggunakan pendekatan historis dalam menganalisis polemik ini. Dalam jurnal tersebut didapati bahwa perempuan secara sejarah tradisi memang tidak pernah menjadi raja kerajaan Mataram Islam, yang kemudian diteruskan oleh Kesultanan Yogyakarta. Selain itu, keberadaan raja perempuan akan menimbulkan degradasi budaya dalam diri Kesultanan Yogyakarta. Sebab terdapat tradisi-tradisi termasuk pusaka yang akan dipensiunkan ketika sang raja perempuan menjabat. Hal ini dikhawatirkan akan membuat Kesultanan Yogyakarta kehilangan karakter asli atau ciri khas dalam diri kebudayaannya.¹²

Keempat, dalam tesis Institut PTIQ Jakarta karya Mohamad Amin yang berjudul, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Pandangan Sa'id Hawwa dalam Al-Asâs fî al-Tafsîr dan Triloginya)*, dijelaskan bahwa Islam mengenal istilah Khalifah sebagai kata ganti untuk pemimpin atau kepemimpinan. Secara bahasa, khalifah (*khalafa-yakhlufu-khilaafatan-wa khalifatan*) mengandung makna arti secara umum, yang berarti ditujukan untuk laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama sebagai khalifah di muka bumi. Dalam sebuah hadist yang artinya berbunyi, “Ketika diceritakan kepada rasulullah SAW bahwa penduduk Paris (Iran, sekarang) diperintah oleh seorang anak perempuan bani kiswa, nabi bersabda: sebuah kaum

¹² Safitri, “Keraton Yogyakarta Masa Lampau dan Masa Kini: Dinamika Suksesi Raja-Raja Jawa dan Politik Wacana ‘Raja Perempuan’”.

tidak akan sukses jika urusan mereka diperintah perempuan. (HR. Muttafaq 'Alaih)”, al Munawi menafsirkan bahwa hadist tersebut sebagai indikasi larangan perempuan sebagai pemimpin. Namun dalam mazhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki bukanlah syarat mutlak untuk menjadi pemimpin. Terdapat posisi-posisi pemimpin yang diperbolehkan untuk perempuan, seperti hakim perdata. Sebab perempuan dianggap memiliki kecakapan dan kredibilitas dalam persoalan perdata.

Kelima, Heri Junaidi dan Abdul Hadi dalam jurnalnya yang berjudul, *Gender dan Feminisme Dalam Islam*, menjelaskan secara mendalam mengenai kepemimpinan dan kaitannya dengan gender. Dalam penelitian ini menjelaskan temuan dari Rosener yang mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan atau manajerial perempuan lebih efektif dan lebih dibutuhkan dalam konteks masyarakat sosio-ekonomik seperti saat ini. Sebab gaya kepemimpinan perempuan memiliki karakteristik transformasional atau berorientasi pada perubahan (*change oriented*), sedangkan laki-laki berkarakter transaksional atau administratif. Dalam sudut pandang ajaran Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS An-Nisa ayat 34, laki-laki memiliki keunggulan daripada perempuan. Keunggulan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah dalam hal tanggung jawab pemenuhan nafkah keluarga. Namun apabila laki-laki tidak dapat bertanggung jawab atas beban tersebut, maka kedudukan diantara keduanya tidak jauh berbeda.¹³

Keenam, penelitian yang ditulis dalam sebuah jurnal oleh M. Rizal dan Gugun yang berjudul, *Pembangkitan Sipil Umat Islam di Yogyakarta terhadap Sabda Raja*, menemukan bahwa umat Islam di Yogyakarta mayoritas menolak Sabda Raja yang dinilai telah bertentangan dengan *paugeran* yang berlaku di Kraton Yogyakarta selama ini. Penolakan

¹³ Junaidi and Hadi, “Gender Dan Feminisme Dalam Islam”.

dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya melalui orasi, pembentangan spanduk, hingga penerbitan buku yang berjudul, “Tolak Sabda Raja”. Dengan aksi-aksi penolakan ini diharapkan Sultan HB X dapat menarik kembali atau membatalkan Sabda Raja yang pernah dikeluarkannya. Meski begitu, Sabda Raja ini bersifat *tan keno wola-wali*.¹⁴

Ketujuh, artikel yang berjudul, *Mengurai Keadilan Gender Perspektif Amina Wadud Muhsin*, karya Ari Susetyo dan Zetty menjelaskan bahwa menurut Amina Wadud tidak ada produk penafsiran yang bersifat objektif. Setiap penafsiran terhadap al-Qur’an pasti ada bias kepentingan subjektif dari penafsirnya. Kemudian, Amina Wadud memberikan metode penafsiran alternatif dengan bercorak Dekonstruktif-Rekonstruktif, Argumentatif-Teologis, dan Hermeneutik-Filosofis. Setiap ayat perlu dipahami konteks zaman disaat ayat tersebut turu, lalu mencoba untuk menemukan ayat-ayat lain yang membahas topik atau tema yang sama dalam al-Qur’an. Kemudian, memahami ayat-ayat tersebut dengan menganalisis bahasa dan struktur sintaksisnya yang sama digunakan dalam al-Qur’an. Dan yang terakhir, menemukan prinsip-prinsip umum dalam ayat-ayat tersebut dan menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai *Weltanschauung* atau pandangan hidup universal.¹⁵

Kedelapan, jurnal dari skripsi yang ditulis oleh Umi Suryaningtiyas berjudul, *Pro dan Kontra Wacana Raja Perempuan di Kraton Yogyakarta*, menguraikan genealogi kekuasaan dari persoalan wacana pengangkatan raja perempuan di Kasultanan Yogyakarta dengan menggunakan teori wacana Foucault. Menurutnya, kuasa bukanlah dimiliki oleh seorang

¹⁴ M. Rizal Qasim and Gugun El Guyanie, “Pembangkangan Sipil Umat Islam di Yogyakarta terhadap Sabda Raja”, *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, vol. 7, no. 1 (2017), pp. 81–111.

¹⁵ Ari Susetyo and Zetty Azizaton Ni'mah, “Understanding Gender Justice Perspective Amin Wadud Muhsin Mengurai Keadilan Gender Perspektif Amina Wadud Muhsin”, *EMPIRISMA Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, vol. 31 (2022), pp. 49–60.

pribadi saja, namun juga harus dimiliki oleh setiap manusia. Dengan diterbitkannya Sabda Raja, ini merupakan bentuk dari upaya pelanggaran kekuasaan yang dilakukan oleh Sultan HB X. Dalam hal ini, Sabda Raja dinilai telah melanggar *paugeran*, namun hal ini dilakukan demi mewariskan tahtanya kepada garis keturunannya, dalam hal ini puteri sulungnya. Disisi lain, berdasarkan pada *paugeran* yang ada, adik-adik sultan juga berupaya untuk merebut kekuasaan dari sang kakak. Namun dalam prosesnya, hal ini tidak dapat dinilai benar atau salah. Karena kuasa terakumulasi melalui pengetahuan. Kubu pro yang diantaranya termasuk Sultan HB X itu sendiri, menganut paham demokrasi dan *equality gender*. Sedangkan masyarakat Yogyakarta secara umum serta adik-adik sultan, menganut tradisi dan *paugeran* atau hukum adat yang berlaku di Kraton Yogyakarta yang telah diturun temurunkan oleh nenek moyang.¹⁶

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis mengenai wacana pengangkatan anak perempuan sultan Yogyakarta sebagai penerus tahta dengan menggunakan perspektif Amina Wadud. Yang membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah analisis dalam kasus ini akan secara khusus dan lebih mendalam menggunakan perspektif Amina Wadud.

E. Landasan Teori

Pemikiran gender Amina Wadud terutama dalam memaknai dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an mengenai perempuan dipengaruhi oleh hermeneutika Fazlur Rahman.¹⁷ Amina Wadud menggunakan metode penafsiran, *Double Movement* (Gerakan Ganda), yaitu metode penafsiran

¹⁶ Umi Suryaningtyas, "Pro dan Kontra Wacana Raja Perempuan di Kraton Yogyakarta", *Skripsi thesis, Universitas Airlangga* (2018).

¹⁷ Sucipto, *Konsep Hermeneutika Fazlur Rahman dan Implikasinya Terhadap Eksistensi Hukum Islam*, accessed 21 Feb 2023.

dengan memahami prinsip-prinsip umum dalam ayat-ayat yang spesifik dalam al-Qur'an (Gerakan pertama) dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan masa kini (Gerakan kedua).¹⁸

Menggunakan metode diatas, Amina Wadud menemukan adanya subordinasi gender dalam penafsiran ayat-ayat gender oleh para mufassir selama ini. Beberapa penafsiran pada ayat-ayat Qur'an dinilai tidak akomodatif terhadap perempuan. Menurutnya, kultur budaya patriarkis yang masih kental dikalangan masyarakat muslim adalah penyebab dari penafsiran-penafsiran tersebut.¹⁹

Berkaitan dengan persoalan kepemimpinan, Amina Wadud menganggap bahwa perempuan memiliki tanggung jawab (*qawwam*) yang sama sebagaimana yang melekat pada diri laki-laki. Amina Wadud memahami adanya hubungan fungsional antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat secara umum. Relasi fungsional antara perempuan dan laki-laki ini berarti saling melengkapi antar perannya dalam masyarakat. Namun, apabila laki-laki tidak dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya, maka ia tidak berhak disebut *qawwam* (pemimpin).

Dalam upaya memahami dalil mengenai kepemimpinan, terutama dalam QS. An-Nisa ayat 34, Amina Wadud mencoba untuk menelaah terlebih dahulu konteks diturunkannya ayat tersebut. Sebab ia meyakini bahwa teks dan penafsir perlu dikaji terlebih dahulu di dalam proses memahami dan menafsirkan suatu ayat.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Setyawan Cahya Edi, "Pemikiran Kesetaraan Gender Dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga", *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 3, no. 1 (2017), p. 73.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang mengkaji mengenai persoalan perempuan menjadi pemimpin dalam pengangkatan Putri Mahkota sebagai calon gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian ini tidak menghasilkan data-data berupa angka, statistik, ataupun bentuk hitungan sejenisnya.

2. Sumber Data

a. Primer

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku karya Susilo Harjono yang berjudul, *Kronik Suksesi Keraton Jawa 1755-1989* dan juga artikel ilmiah, serta artikel-artikel berita yang terkait objek penelitian yang dibahas. Sumber primer ini menjadi sumber rujukan utama dalam menganalisis permasalahan di dalam penelitian.

b. Sekunder

Sedangkan data sekunder yang digunakan ialah bersumber dari buku-buku Amina Wadud yang diantaranya adalah *Qur'an and Women* (1992) dan *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam* (2006). Selain itu juga buku-buku dan juga karya ilmiah yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan. Data sekunder ini digunakan sebagai pelengkap dan penunjang data primer yang digunakan dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan dokumentasi yang didapat melalui buku-buku yang terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian. Dalam hal ini, buku-buku yang

terkait dengan perempuan sebagai pemimpin dalam perspektif Amina Wadud.

4. Analisis Data

Penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif-interpretatif. Dalam penelitian ini mencoba memahami konsep perempuan sebagai pemimpin dalam karya-karya Amina Wadud untuk menganalisis kasus pengangkatan GKR Mangkubumi sebagai putri mahkota raja kesultanan Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini secara sistematis tersusun dalam beberapa bab berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang diantaranya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai tinjauan umum terkait dengan perempuan sebagai pemimpin di kerajaan-kerajaan Hindhu-Buddha dan Islam di Nusantara. Selain itu, juga membahas mengenai profil Kesultanan Yogyakarta.

Bab ketiga, memaparkan proses suksesi raja-raja di Kesultanan Yogyakarta sebelumnya dan paugeran yang terkait suksesi kekuasaan Kesultanan Yogyakarta.

Bab keempat berisi analisis kasus pengangkatan GKR Mangkubumi sebagai penerus sultan Kesultanan Yogyakarta dalam perspektif filsafat gender Amina Wadud.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang menampung jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari penelitian ini. Dan saran untuk penelitian berikutnya dalam menyempurnakan penelitian ini



BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis konsep perempuan sebagai pemimpin dalam perspektif Amina Wadud dapat peneliti simpulkan bahwa:

Islam memperbolehkan perempuan untuk menjadi pemimpin, baik dalam ruang domestik, sosial, politik, budaya, atau bahkan agama. Sebagaimana yang pernah digagas oleh seorang aktivis gender muslim, Amina Wadud, bahwa tidak ada larangan dalam al-Qur'an mengenai kepemimpinan perempuan. Menurutnya, perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam menjadi pemimpin. Wadud juga tidak menemukan larangan secara eksplisit mengenai pelarangan perempuan sebagai pemimpin. Bahkan, ia justru menafsirkan pada ayat yang menjadi petunjuk dalam persoalan ini pada QS. An -Nisa' ayat 34, bahwa perempuan dan laki-laki dapat menjadi pemimpin berdasarkan pada kemampuan dan kriteria tertentu dalam al-Qur'an. Meski secara tekstual dalam awal kalimat pada ayat tersebut, jika laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Namun, ayat tersebut tidak menegaskan secara absolut bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Seorang laki-laki dapat menjadi pemimpin apabila telah memenuhi syarat berupa mampu dan dapat memenuhi kebutuhan perempuan.

Selain itu, kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama dan sederajat di hadapan Allah. Yang membedakan diantara manusia adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah, Tuhan Semesta Alam. Meskipun pada awal penciptaan laki-laki dan perempuan berbeda, namun bukan berarti kedudukan diantara keduanya berbeda juga. Wadud memahami kedudukan laki-laki dan perempuan berdasarkan QS. An-Nisa' ayat 34, tepatnya pada kata *faddala*, bahwa kelebihan yang diberikan Allah

kepada laki-laki disini bersifat relatif. Dan tidak setiap laki-laki secara mutlak memiliki kelebihan diatas perempuan. Menurut Wadud juga, pada ayat ini terjadi banyak kesalahpahaman oleh cara penafsiran klasik. Bahkan lebih buruknya lagi menjadi alat validasi untuk merampas hak-hak perempuan, serta membatasi ruang perempuan hanya sebatas pada ranah domestik saja.

Sementara dalam kasus wacana raja perempuan di Kasultanan Yogyakarta, banyak yang menolak wacana tersebut dengan alasan budaya atau *paugeran* dan juga tidak sedikit yang beralasan dengan nilai-nilai keagamaan. Kasultanan Yogyakarta sendiri merupakan pewaris Kerajaan Mataram Islam yang terpecah menjadi 2 kerajaan besar. Sehingga nilai-nilai keislaman dalam Kasultanan Yogyakarta masih begitu kental. Namun demikian, akibat dari produk penafsiran klasik menyebabkan beberapa kerabat ataupun warga Yogyakarta menganggap tabu seorang perempuan sebagai seorang pemimpin, atau dalam hal ini menjadi sultan atau gubernur DIY. Pendapat kontra pada wacana raja perempuan ini juga berpendapat bahwa selama ini Kasultanan Yogyakarta tidak pernah memiliki seorang raja yang berjenis kelamin perempuan. Karena *paugeran* Kasultanan Yogyakarta yang bernafaskan nilai-nilai ajaran Islam tidak menghendaki seorang perempuan untuk menjadi raja.

Disisi lain, seorang sultan Yogyakarta juga selain dianggap sebagai pemimpin politik dan sosial, ia juga dianggap sebagai pemimpin agama yang membimbing umat untuk dekat dan menjalankan ajaran-ajaran Islam. Di dalam pemahaman Islam yang bercorak klasik, sebuah hal yang tidak wajar apabila seorang perempuan menjadi pemimpin atas umat. Hal ini jugalah yang kemudian dipersoalkan oleh mereka yang mengkritik wacana ini. Menanggapi hal tersebut, Sultan HB X kemudian menghapus gelar *khalifatullah* di dalam gelarnya. Tentu hal ini semakin menuai protes banyak pihak. Penghapusan gelar ini dinilai telah menghilangkan nilai-nilai ajaran Islam di dalam Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Selain itu juga, penghapusan gelar ini semakin menegaskan kehendak Sultan HB X untuk mengangkat putri sulungnya untuk menjadi pewaris tahta berikutnya.

B. Saran

Dalam upaya mengembangkan dan menyempurnakan penelitian ini, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat menelaah lebih dalam pemikiran Amina Wadud terutama mengenai metodologi penafsiran beliau. Penelaahan bahasa, dalam hal ini bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur'an, merupakan bagian penting dalam metode tafsirnya. Namun, karena keterbatasan kemampuan berbahasa dari peneliti dalam penelitian ini, pembahasan mengenai bahasa masih kurang dalam dan perlu diperkaya serta disempurnakan lagi.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian serta rujukan dalam penelitian berikutnya. Ataupun dapat menjadi bahan rujukan untuk mata kuliah Filsafat Gender atau yang sejenisnya. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel penelitian mengenai wacana kepemimpinan perempuan dalam Kasultanan Yogyakarta dan relevansinya dengan kesetaraan gender dalam Islam perspektif Amina Wadud.



DAFTAR PUSTAKA

- Aminy, Muhammad Mutawali, *Pandangan Amina Wadud terhadap Perempuan Menjadi Imam Sholat Laki-laki*, vol. 9, no. 1, 2020, pp. 15–32 [<https://doi.org/10.20414/schemata.v9i1.1021>].
- Ann, Brooks, *Postfeminism: Feminism, Cultural Theory and Cultural Forms*, London: Routledge, 1997.
- Atiq, Diana Sitatul, “Sabda Raja Sultan Hamengku Buwono X Menurut Aktivis PWNu Yogyakarta Dan Aktivis PWM Yogyakarta: Studi Analisis Terhadap Penghapusan Gelar Khalifatullah”, *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, vol. 4, no. 1, 2016, p. 1 [<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v4i1.2844>].
- Bahagijo, Sugeng and Asmara Nababan, *Hak Asasi Manusi: Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*, Jakarta: KOMNAS HAM, 1999.
- Cahya Edi, Setyawan, “Pemikiran Kesetaraan Gender Dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga”, *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 3, no. 1, 2017, p. 73.
- Firdaus, Haris, “Putusan MK: Perempuan Dapat Menjabat Gubernur DIY”, *KOMPAS*, Yogyakarta, Agustus 2017, <https://www.kompas.id/baca/utama/2017/08/31/putusan-mk-perempuan-dapat-menjabat-gubernur-diy>, accessed 15 Jul 2023.
- Gabrielle Sanger, Beverly, “Perlindungan Hak Politik Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia Dan Pengaturannya Dalam Konvensi Internasional”, *Lex Et Societatis*, vol. VII, no. 3, 2019, pp. 163–71.
- Gaviota, Andrea, *ABC Feminisme*, Yogyakarta: Bright Publisher, 2021.
- Harjono, Susilo, *Kronik Suksesi Keraton Jawa 1755-1989*, Yogyakarta: Research Centre for Politics and Government Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2012.

- Harlina, Yuni, “Hak Politik Perempuan dalam Islam”, *Marwah*, vol. XIV, no. 1, 2015, pp. 1–18.
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme; Dalam kajian Tafsir al Qur’an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Jannatur Rahmah, Putri and Yusdani Yusdani, “Konsep Gender Equality Perspektif Islam : Studi Kasus Pengangkatan Putri Mahkota Sri Sultan Hamengkubuwana X Di Yogyakarta”, *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, vol. 2, no. 1, 2020, pp. 362–80 [https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss1.art13].
- Jati, Wasisto, “Historisitas Politik Perempuan Indonesia”, *Paramita: Historical Studies Journal*, vol. 24, 2014 [https://doi.org/10.15294/paramita.v24i2.3123].
- Junaidi, H. (Heri) and A. (Abdul) Hadi, “Gender Dan Feminisme Dalam Islam”, *Muwazah*, vol. 2, no. 2, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2010, p. 153164, https://www.neliti.com/publications/153164/, accessed 20 Feb 2023.
- Kartini, Ade and Asep Maulana, “Redefinisi Gender dan Seks”, *An-Nisa’: Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, vol. 12, no. 2, 2019.
- Lasminah, Putu, *Nyi Ageng Serang*, Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2007.
- Marilawati, C., *Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Amina Wadud*, 2019.
- Moedjanto, G., *Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-raja Mataram*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Nur Fitroh, Anah and Aminuddin Kasdi, “Peran Tribhuwana Tungadewi dalam Mengembalikan Keutuhan dan Perkembangan Kerajaan Majapahit Tahun 1328-1350”, *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, vol. 5, no. 2, 2017, pp. 298–308.
- Qasim, M. Rizal and Gugun El Guyanie, “Pembangkangan Sipil Umat Islam di Yogyakarta terhadap Sabda Raja”, *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, vol. 7, no. 1, 2017, pp. 81–111.

- Rasyidin, *Politik Gender Aceh*, Aceh: Unimal Press, 2019.
- Rida Pertama, Prdito, “2 Adik Sultan HB X Dipecat, Ini Penjelasan Keraton Yogyakarta”, *detikNews*, 20 Jan 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5341464/2-adik-sultan-hb-x-dipecat-ini-penjelasan-keraton-yogyakarta>.
- Safitri, Ilmiawati, “Keraton Yogyakarta Masa Lampau dan Masa Kini: Dinamika Suksesi Raja-Raja Jawa dan Politik Wacana ‘Raja Perempuan’”, *Indonesian Historical Studies*, vol. 3, no. 1, Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP), 2019, p. 44 [<https://doi.org/10.14710/IHIS.V3I1.4850>].
- Sanders, Valerie, “First Wave Feminism”, in *Cambridge Companion to Feminism and Postfeminism*, 2006.
- Sucipto, *Konsep Hermeneutika Fazlur Rahman dan Implikasinya Terhadap Eksistensi Hukum Islam*, accessed 21 Feb 2023.
- Suprayogi, Yosep, “NU dan Muhammadiyah Protes Sabda Raja Yogya”, *tempo.co*, Yogyakarta, Mei 2015, <https://nasional.tempo.co/read/664246/nu-dan-muhammadiyah-protos-sabda-raja-yogya#:~:text=%E2%80%9CTradisi%20keraton%20itu%20sudah%20baik%2C%20tak%20perlu%20diubah,bicara%20soal%20kesetaraan%20namun%20pakem%20adatnya%2C%E2%80%9D%20ujar%20di> a.
- Suryaningtyas, Umi, “Pro dan Kontra Wacana Raja Perempuan di Kraton Yogyakarta”, *Skripsi thesis, Universitas Airlangga*, 2018.
- Susetyo, Ari and Zetty Azizatul Ni'mah, “Understanding Gender Justice Perspective Amin Wadud Muhsin Mengurai Keadilan Gender Perspektif Amina Wadud Muhsin”, *EMPIRISMA Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, vol. 31, 2022, pp. 49–60.
- Susilowati, Wahyuni, “GKR Mangkubumi Akan Jadi Ratu Pertama Kraton Yogyakarta”, *kompasiana*, 2019, <https://www.kompasiana.com/sacred-edelweiss/5db96189d541df77141794c2/gkr-mangkubumi-akan-jadi-ratu-pertama-kraton-yogya>.

Suwastini, Ni Komang Arie, “Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 2, no. 1, 2013, pp. 198–208 [<https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v2i1.1408>].

Thompson, Becky, “Multiracial Feminism: Recasting the Chronology of Second Wave Feminism”, in *No Permanent Waves- Recasting Histories of US Feminism*, New Brunswick, New Jersey, London: Rutgers University Press, 2010.

Tuttle, Lisa, *Encyclopedia of Feminism*, New York: Facts on File, 1986.

Wadud, Amina, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, New York: Oxford University Press, 1999.

----, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*, Universitas Michigan: Oneworld Publications, 2006.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA